

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kebijakan Publik pada dasarnya dibuat adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada yang mana pada konteks penelitian ini adalah suatu masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Upaya untuk mengejar ketertinggalan serta sekaligus meningkatkan skor PISA, Kemendikbudristek menciptakan sebuah kebijakan yakni Program Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada tahun 2022 ini dengan tiga fase yang saat ini adalah masih tahap fase pertama.

Desa Pekalongan yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga, seluruh sekolah dasarnya sudah menerapkan Kurikulum Merdeka yang mana pada fase pertama yang mana di tingkat sekolah dasar baru diterapkan pada kelas 1 dan 4 dahulu, lalu tahun berikutnya akan dilanjutkan pada kelas 1,2,3,4, dan 5. Setelah itu baru pada tahun ketiga akan dilaksanakan pada kelas 1 sampai 6. Dari sini bisa diketahui bahwa murid-murid sekolah dasar ini merupakan target group dari kebijakan ini.

Kemudian dalam sebuah penelitian perlu beberapa hal yang mempengaruhi sebuah penelitian. Hal-hal yang mempengaruhi penelitian menurut Van Horn dan Van Meter adalah:

1. Ukuran dan tujuan implementasi kebijakan program Kurikulum Merdeka ini adalah untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang diakibatkan

oleh efek pandemik Covid-19, dan tujuan kebijakan ini dibuat adalah dengan target group siswa PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah ke atas. Namun kebijakan ini masih pada fase pertama.

2. Sumberdaya menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan Program Kurikulum Merdeka yang mana terdapat dua sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia dan non manusia. Hasil penelitian di SD Desa Pekalongan adalah terdapat sumberdaya manusia yang kurang siap serta terdapat kurangnya penguasaan IPTEK oleh para implementator. Kemudian untuk sumberdaya non manusia di sekolah dasar Desa Pekalongan terdukung oleh adanya perangkat wifi yang ada pada di Sekolah-sekolah dasar di Desa Pekalongan.
3. Karakteristik agen pelaksana, pelaksana kebijakan di penelitian ini yakni guru sebagai implementator Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Pekalongan cukup antusias untuk melaksanakan kurikulum baru ini.
4. Sikap dan kecenderungan Pelaksana kebijakan yakni guru SD Pekalongan memiliki sikap dan kecenderungan yang mendukung terhadap kurikulum baru ini. Hal ini karena kebanyakan para implementator menganggap kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 memiliki kelemahan seperti tidak berurutannya materi pembelajaran. Hal ini berbeda dengan Kurikulum Merdeka yang dianggap lebih berurutan sehingga memudahkan para guru dan murid.
5. Komunikasi antar pelaksana tentunya perlu ditingkatkannya komunikasi antar pelaksana kebijakan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak guru di Desa Pekalongan membutuhkannya pelatihan dan sosialisasi tentang pemahaman

kurikulum baru ini lebih intens atau sering agar para implementator lebih memahami kurikulum baru ini sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar.

6. Lingkungan eksternal ini di antaranya adalah faktor finansial yang mana jika dilihat melalui observasi di Desa Pekalongan sendiri hal ini masih kurang begitu ada masalah untuk saat ini.

Selain itu perlu juga mengetahui dan memahami aktor-aktor dalam penelitian. Aktor implementator pada fokus penelitian ini adalah tenaga pengajar atau guru-guru SD Desa Pekalongan itu sendiri. Guru ini juga bisa disebut juga sebagai street level bureaucracy, menurut Lipsky street level bureaucracy adalah pekerja yang bekerja di bidang sektor pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga dalam pekerjaan mereka dan memiliki keleluasaan substansial dalam pekerjaan mereka. Hal ini membuat guru menjadi bagian yang sangat signifikan untuk berjalannya serta keberhasilan Program Kurikulum Merdeka. Signifikan yang dimaksud adalah bahwa guru sebagai street level bureaucracy adalah yang mana para guru atau implementator inilah yang nantinya menentukan suatu keberhasilan jalannya suatu kebijakan. Hal ini karena suatu kebijakan yakni Kurikulum Merdeka yang diciptakan oleh Kemendikbudristek kemudian diinstruksikan kepada para implementator yakni para guru untuk melaksanakannya. Tentu para guru ini memiliki instruksi dari atasannya untuk mengimplementasi Kurikulum Merdeka ini, namun pada akhirnya para guru inilah yang berkuasa untuk menjalankan Kurikulum baru ini sesuai dengan keleluasaan dan preferensinya masing-masing.

Dalam melakukan implementasi kebijakan ini terdapat beberapa faktor pendorong yang di antaranya adalah terdapatnya jaringan internet di seluruh sekolah dasar Desa Pekalongan, Purbalingga dan terdapatnya antusiasme dan dukungan implementator yakni guru terhadap Program Kurikulum Merdeka ini. Adapun faktor penghambatnya antara lain: rendahnya tingkat kepehaman IPTEK oleh beberapa kalangan guru terutama yang sudah cukup tua atau senior sehingga menghambat pemahaman atas Kurikulum baru ini. Kemudian kurikulum di Indonesia sangatlah sering berganti dan Kurikulum Merdeka ini masih tergolong baru yang mana butuhnya lebih banyak lagi sosialisasi serta pelatihan untuk guru-guru agar lebih memahami kurikulum ini.

Setelah melakukan penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka pasca Covid-19 di Desa Pekalongan, Kabupaten Purbalingga khususnya pada tingkat sekolah dasar sudah dilaksanakan. Namun pelaksanaan ini tidak lepas dari hambatan-hambatan dan permasalahan yang mana realitas di lapangan berbeda dengan instruksi idealisme yang diberikan oleh pemerintah, lebih tepatnya Kemendikbudristek sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini belum bisa dikatakan maksimal.

Kemudian juga perlu diketahui bahwa masih belum bisa diketahui apakah langkah Kurikulum Merdeka ini bisa dibilang berhasil untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi, mengingat pelaksanaan kurikulum ini masih pada fase pertama, sehingga diperlukan penelitian lanjutan.

## 5.2 Saran

Sebuah kebijakan yang berjalan di sekolah-sekolah dasar Desa Pekalongan tentunya jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dapat diketahui melalui dampak-dampak penghambat dan kendala-kendala yang terjadi di sana yang mana sudah seperti dituliskan oleh peneliti di bagian hasil dan pembahasan.

Kebijakan kurikulum Merdeka yang ini bisa dikatakan baru dan baru pada fase pertama ini tentunya membutuhkan perbaikan agar bisa berjalan dengan lancar, saran dari peneliti di antaranya adalah: perlu dibutuhkannya pelatihan dan *training* lebih lanjut dan mendalam. Pelatihan ini ditujukan kepada implementator kebijakan yakni para guru yang menjalankan kebijakan. Hal ini perlunya pelatihan lebih lanjut dikarenakan masih banyak para agen implementator yang merasa sebuah pelatihan melalui KKG setiap bulannya itu masih juga belum cukup untuk memahami kebijakan ini. Oleh karena itu dibutuhkannya pelatihan yang lebih intens serta lebih mendalam terkait pemahaman kebijakan Program Kurikulum Merdeka ini.

Kemudian selain itu dibutuhkannya persiapan lebih matang oleh pemerintah yang membuat program Kurikulum Merdeka ini dalam hal mengesahkan kurikulum baru ini. Hal ini dikarenakan pada fakta lapangan masih banyak sekolah-sekolahan yang belum melaksanakan serta belum siap untuk menjalankan Kurikulum Merdeka ini. Sehingga perlunya persiapan yang lebih matang oleh pembuat kebijakan yakni Kemendikbudristek serta dibutuhkannya survey-survey terhadap sekolah yang nantinya akan menerapkan kurikulum merdeka.